

3. PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensikronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, dalam pelaksanaannya ada permasalahan-permasalahan muncul untuk diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai aparatur pengawasan internal dan pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan, Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa “RKPD” dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa “Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan”, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

- a. Kerangka Ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;

- d. Penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, ada beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk melakukan perubahan atas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini. Hal ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, perubahan kebijakan terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada program strategis daerah yang tertuang pada perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
Dengan RPJMD Pemerintah Kota Blitar

RPJMD			RENSTRA		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis
<u>MISI KE 5</u> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan sistem daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ/ Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No.1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
38. Peraturan Daerah Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 39. Peraturan Wali Kota Blitar No.60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
 40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota noor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
 41. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22).
 42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 71).
 43. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 |
| BAB III | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya |
| BAB IV | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah |

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Pernangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
	Tujuan 1 :																				
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85		85,60		86,69												
	Sasaran 1 :																				
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85		85,60		86,69												
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks	85,5	32.573.251.650	84,38	7.241.399.896	84,5	7.338.470.6	88,00	1.376.499.7	85,42	2.283.988.342	85,42	3.660.488.089	85,42	10.901.887.985	99,91	33,47	Sekretariat

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	440.568.931	100	67.092.300	100	53.414.100	45,24	4.160.000	12,73	3.963.000	57,94	8.123.000	100	75.215.300	100,00	17,07	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	43.059.485	9	9.669.000	9	6.357.700	3	2.080.000	1	1.883.000	4	3.963.000	13	13.632.000	36,11	31,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	397.509.446	7	57.423.300	7	47.056.400	4	2.080.000	1	2.080.000	5	4.160.000	12	61.583.300	42,86	15,49	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			39,5	23,58	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	25.622.742.948	100	5.642.079.587	100	5.971.286	31,53	1.019.464.031	61,26	2.028.220.355	92,79	3.047.684.386	100	8.689.763.973	100,00	33,91	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	25.530.553.74	37	5.622.356.587	37	5.965.457.6	35	1.019.464.031	34	2.028.220.355	35	3.047.684.386	35	8.670.040.973	94,59	33,96	
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	250	41.525.253	321	9.145.000	250	1.590.000	-	0	-	0	-	0	321	9.145.000	128,40	22,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	72	50.662.321	18	10.578.000	18	4.240.000	3	0	3	0	6	0	24	10.578.000	33,33	20,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		85,4	25,62		
Predikat kinerja(%)																		TINGGI	SANGAT RENDAH		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	1.703.556.769	100	437.370.500	100	422.486.000	49,65	176.485.180	7,97	32.561.600	57,62	209.046.780	100	646.417.280	100,00	37,95	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	227.897.859	2	65.385.000	2	49.739.800	1	20.029.500	0	0	1	20.029.500	3	85.414.500	37,50	37,48	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	47	484.071.552	47	112.307.600	46	148.309.200	2	5.000.000	11	32.561.600	13	37.561.600	46	149.869.200	97,87	30,96	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	37	991.587.358	38	259.677.000	37	224.437.000	35	151.455.680	0	0	35	151.455.680	37	411.133.580	100,00	41,46	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			78,5	36,63	
Predikat kinerja(%)																			TINGGI	SANGAT RENDAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	1.289.962.071	100	409.592.623	100	297.839.500	38,81	91.129.294	20,24	73.582.240	59,05	164.711.534	100	574.304.157	100,00	44,52	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.949.856	1	4.161.000	1	4.489.000	1	4.489.000	0	0	1	4.489.000	2	8.650.000	50,00	48,19	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12 9. 34 6. 94 2	3	26. 415 .75 0	4	27 .6 79 .1 00	1	5. 56 4. 50 0	1	8. 70 0. 00 0	2	14 .2 64 .5 00	5	40.68 0.250	41,67	31,45	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	70 .3 35 .1 80	4	19. 672 .09 4	4	20 .1 26 .5 00	1	4. 88 6. 00 0	1	2. 84 0. 00 0	2	7. 72 6. 00 0	6	27.39 8.094	50,00	38,95	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	10 8. 79 1. 86 5	20	23. 286 .00 0	12	19 .8 42 .8 00	2	2. 76 2. 30 0	6	9. 39 5. 00 0	8	12 .1 57 .3 00	28	35.44 3.300	58,33	32,58	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	72 .0 62 .1 44	1	16. 431 .77 0	2	15 .9 36 .0 00	1	7. 00 0. 00 0	0	0	1	7. 00 0. 00 0	2	23.43 1.770	50,00	32,52	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	96	23.274.675	24	5.100.000	12	2.700.000	3	0	2	900.000	5	900.000	29	6.000.000	30,21	25,78	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	8.201.409	39	314.526.009	20	207.066.100	6	66.427.494	5	51.747.240	11	118.174.734	50	432.700.743	75,76	49,84	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			50,9	37,04	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	983.127.254	100	106.800.000	100	13.977.900	0,00	0	20,00	2.110.000	20,00	2.110.000	100	108.910.000	100,00	11,08	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	20	332.330.395	2	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.500.000	10,00	4,36	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84	650.796.859	23	92.300.000	5	13.977.900	0	0	1	2.110.000	1	2.110.000	24	94.410.000	28,57	14,51	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			19,3	9,43	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	1.195.517.433	100	346.225.706	100	412.774.950	20,19	69.128.942	27,88	107.978.426	48,07	177.107.368	100	523.333.074	100,00	43,77	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	376.305.150	26	66.355.341	24	103.689.600	6	207.438.50	6	172.819.42	12	380.257.92	38	104.381.133	26,39	27,74	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	819.212.283	13	279.870.365	13	309.085.350	2	483.850.92	4	906.964.84	6	139.081.576	19	418.951.941	36,54	51,14	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			31,5	39,44	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	1.337.776.244	100	232.239.180	100	166.691.300	6,22	161.323.00	25,92	355.727.21	32,14	517.050.21	100	283.944.201	100,00	21,23	

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	24 5. 41 0. 35 4	18	112 .46 1.9 80	18	81 .5 28 .8 00	2	7. 37 5. 80 0	4	17 .1 80 .7 21	6	24 .5 56 .5 21	18	137.0 18.50 1	105,8 8	55,83	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	22 .2 79 .0 36	0	0	3	3. 68 1. 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	90 .5 12 .6 25	0	0	84	32 .9 71 .5 00	22	8. 75 6. 50 0	28	11 .1 42 .0 00	50	19 .8 98 .5 00	50	19.89 8.500	62,50	21,98	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	86 .2 02 .5 00	0	0	1	25 .0 00 .0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	475.320.585	2	60.426.000	1	13.510.000	0	0	0	0	0	0	2	60.426.000	25,00	12,71	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	418.051.144	4	59.351.200	1	10.000.000	0	0	1	7.250.000	1	7.250.000	4	66.601.200	100,00	15,93	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			48,9	17,74	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			100,00	29,93	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan pihak ke III dalam hal pengadaan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pertanggungjawaban terhadap kinerja yang sudah terlaksana belum dilakukan sesuai jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih menaati jadwal dalam melaksanakan pertanggungjawaban																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai Perencanaan																					

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
	Tujuan 2 :																				
	Meningkatny a kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP																
	Sasaran 2 :																				
	Meningkatny a kualitas pengawasan pemerintah daerah		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	%	85																
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.335																
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	92,5	12 .7 33 .1 17 .9 99	92	2.1 48. 854 .28 7	89	2. 00 2. 24 1. 00 0	92,6 4	14 6. 71 0. 00 0	94,5 4	20 5. 36 3. 00 0	94,5 4	35 2. 07 3. 00 0	94,54	2.500. 927.2 87	102,2 1	19,64	Irban I
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	85		83,0 7		80		75,5 6		80,8 7		80,8 7		80,87		95,14		Irban I

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%	100		100		90		100		100		100		100		100,00		Irbansus
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	92,5		92		89		92,64		94,54		94,54		94,54		102,21		Irban II
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	92,5		83,07		80		75,56		80,87		80,87		80,87		87,43		Irban II
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	PD	10	12.464.973.443	10	2.102.714.887	10	1.974.871.900	0	144.060.000	0	205.363.000	0	349.423.000	10	2.452.137.887	100,00	19,67	
			Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	90		92		90		92,64		94,54		94,54		94,54		105,04		

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	%	70		100		70		100		100		100		100		142,8 6		
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	87,5		88,5		87,5		88,5		88,5		88,5		88,5		101,1 4		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	120	66 9. 73 1. 16 7	33 	107 .17 0.2 00	30	88 .6 93 .7 00	6 	3. 23 3. 00 0	4 	12 .3 17 .0 00	10 	15 .5 50 .0 00	43 	122.7 20.20 0	35,83	18,32	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	160	36 5. 13 8. 54 5	42 	83. 826 .00 0	40	55 .4 26 .8 00	7 	9. 68 9. 00 0	6 	7. 12 4. 00 0	13 	16 .8 13 .0 00	55 	100.6 39.00 0	34,38	27,56	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	120	2. 89 8. 62 9. 73 1	90 	226 .19 9.6 60	30	20 9. 44 2. 60 0	1 	3. 49 8. 00 0	1 	2. 22 6. 00 0	2 	5. 72 4. 00 0	92 	231.9 23.66 0	76,67	8,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	200	583.130.576	76	133.989.100	50	88.484.500	3	8.646.000	4	5.532.000	7	14.178.000	83	148.167.100	41,50	25,41	
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	12	7.165.860.057	3	1.488.338.027	3	1.522.699.300	2	118.994.000	2	178.164.000	4	297.158.000	7	1.785.496.027	58,33	24,92	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	16	782.483.367	4	63.191.900	4	10.125.000	0	0	0	0	0	0	4	63.191.900	25,00	8,08	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			45,3	18,71	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	%	100	268.144.556	100	46.139.400	100	27.369.100	0	2.650.000	0,00		0	2.650.000	100	48.789.400	100,00	18,20	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8	130.405.702	2	23.905.400	2	7.420.000	0		0		0		2	23.905.400	25,00	18,33	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	38	137.738.854	8	22.234.000	4	19.949.100	0	2.650.000	0		0	2.650.000	8	24.884.000	21,05	18,07	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			23,0	18,20	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			109,81	18,93	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan Obyek Pemeriksaan																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Data yang dikumpulkan oleh auditan kurang sesuai 2. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Meningkatkan Koordinasi dengan Auditan terkait permintaan data audit 2. Mengoptimalkan pengembangan aplikasi agar lebih efektif																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai perencanaan 2. Meningkatkan Kapabilitas APIP																					
	Tujuan 3 :																				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	Nilai	BB (72,35)																
	Sasaran 3 :																				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	%	100																
III		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	4.00 1.07 5.90 1	100 599.35 9.97		100 609.65 0.70 0		0,00 198.77 8.39 9		0,00 62.248 .900		0,00 261.02 7.29 9		100 860.387.296		100,00 21,50	Irbansus	

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	1		1		1		0,00		0,00		0,00		1		100,00		Irbansus
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	29		30		30		0,00		0,00		0,00		30		103,45		Irbansus
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	dokumen	4	315.299.604	4	62.450.250	4	34.322.700	0	8.480.000	0	7.155.000	0	15.635.000	4	78.085.250	100,00	24,77	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	16	65.785.507	4	15.033.850	4	8.710.000	0	6.360.000	0	0	0	6.360.000	4	21.393.850	25,00	32,52	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	16	249.514.097	4	47.416.400	4	25.612.700	0	2.120.000	1	7.155.000	1	9.275.000	5	56.691.400	31,25	22,72	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		28,1	27,62		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	PD	16	3.685.776.297	4	536.909.747	4	575.328.000	0	190.298.399	0	55.093.900	0	245.392.299	4	782.302.046	25,00	21,22	
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	%	100		100		100		0		0		0		100		100,00		
			Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100		100		100		0		0		0		100		100,00		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	30	331.987.279	30	69.871.200	30	8.098.200	0	0	13	3.445.000	13	3.445.000	30	73.316.200	100,00	22,08	

N o	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	10	45 2. 99 4. 13 8	10	80. 430 .79 7	10	25 8. 74 3. 60 0	0	16 5. 45 7. 39 9	2	20 .1 43 .7 50	2	18 5. 60 1. 14 9	10	266.0 31.94 6	100,0 0	58,73	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	64	37 9. 41 9. 73 1	17	105 .89 5.7 50	16	86 .9 15 .2 00	3	16 .2 21 .0 00	4	16 .7 65 .1 50	7	32 .9 86 .1 50	24	138.8 81.90 0	37,50	36,60	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	24	2. 52 1. 37 5. 14 9	6	280 .71 2.0 00	6	22 1. 57 1. 00 0	0	8. 62 0. 00 0	5	14 .7 40 .0 00	5	23 .3 60 .0 00	11	304.0 72.00 0	45,83	12,06	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			70,8	32,37	
Predikat kinerja(%)																			SEDANG	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			109,8 1	18,93	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
Predikat kinerja(%)																SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dasar hukum yang mendukung kelancaran kinerja Pengawasan dan Pendampingan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat Mandatory yang diluar PKPT sehingga mengurangi waktu pendampingan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih Cermat dalam Penyusunan PKPT																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan dan disiplin Anggaran sesuai Perencanaan																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)														96,49	25					
Predikat kinerja(%)														SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH					
Total														9.950.362.156,00		4273588388,00				
Persentase Realisasi Anggaran														42,95%						
Predikat														SANGAT RENDAH						

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator a. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1, b. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2.
2. Realisasi kinerja program yang sesuai target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi).
3. Realisasi kinerja program yang di bawah target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator a. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 dan b. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
4. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II masih di bawah target tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal;
- b. Terdapat Mandatory yang diluar PKPT sehingga mengurangi waktu pendampingan;
- c. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut;
- d. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara

berkelanjutan.

- c. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
- d. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- e. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.
- f. Mengoptimalkan klinik konsultasi pengawasan.
- g. Melakukan pergeseran anggaran sub kegiatan yang realisasi kinerjanya sudah tercapai untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	72,25	74,795
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	100 %	100%
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	83 %	83 %

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		2. Nilai Maturitas SPIP	Pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan system yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP mengembangkan model Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3	-	3,332
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja	A (84,98)	A (86,69)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.		
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	A (84,98)	A (86,69)

- Keterangan :
- 1. Penambahan indikator “ Nilai Maturitas SPIP ” merupakan penyesuaian dari Perubahan Pohon Kinerja Inspektorat Daerah terbaru.
 - 2. Terhadap penambahan indikator Nilai Maturitas SPIP tersebut, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui Peningkatan kualitas pengawasan daerah dengan kebijakan Peningkatan kapasitas pengawasan daerah dan Penguatan sistem pengendalian internal.

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Melakukan pendampingan OPD yang diusulkan zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progres dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2	Memaksimalkan aplikasi PATRIAWAS untuk penyelesaian SI	▪ Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SI PATRIAWAS	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
	rekomendasi APIP dan BPK	▪ Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan	Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3	Penguatan Kapabilitas APIP	▪ Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
4	Melakukan pembinaan SPIP secara berkelanjutan	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan
- Program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2024 terdiri dari 3 program,11 kegiatan, dan 38 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks	84,5	84,5	7.338.470.456	7.533.202.556	
601.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	53.414.100	53.414.100	
601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	6.357.700	6.357.700	
601.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	47.056.400	47.056.400	
601.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	5.971.286.706	5.739.501.506	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	34	5.965.456.706	5.733.671.506	Penyesuaian karena ada pegawai yang purna dan mutasi
601.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	250	250	1.590.000	1.590.000	
601.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	4.240.000	4.240.000	
601.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	422.486.000	590.867.000	
601.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	49.739.800	49.739.800	
601.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	46	148.309.200	148.309.200	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	37	34	224.437.000	392.818.000	Penambahan volume kegiatan bimtek
601.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	297.839.500	425.525.700	
601.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.489.000	4.489.000	
601.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	27.679.100	27.679.100	
601.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	20.126.500	20.126.500	
601.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	19.842.800	19.842.800	
601.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	15.936.000	15.936.000	
601.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	2.700.000	2.700.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	32	207.066.100	334.752.300	1. Penambahan kegiatan untuk pendampingan OPD dalam rangka memenuhi panggilan dari APH 2. Meningkatnya volume kegiatan yang diadakan oleh KPK
601.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	13.977.900	73.440.000	
601.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	13	13.977.900	73.440.000	Penambahan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarpras kantor
601.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	412.774.950	418.462.950	
601.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	103.689.600	103.689.600	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	309.085.350	314.773.350	Penambahan Seragam untuk THL yang belum teranggarkan pada DPA Murni
601.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	166.691.300	231.991.300	
601.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	81.528.800	106.526.800	Penambahan belanja BBM
601.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3.681.000	3.681.000	
601.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	61	32.971.500	32.971.500	
601.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	25.000.000	50.000.000	Integrasi aplikasi
601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	13.510.000	28.812.000	Pemeliharaan ruang kerja pejabat eselon II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	10.000.000	10.000.000	
601,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	89	89	2.002.241.000	1.992.995.700	
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	80	80			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%	90	90			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	89	89			
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	80	80			
601.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	PD	10	10	1.974.871.900	1.974.126.600	
		Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	90	90			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	%	70	70			
		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	87,5	87,5			
601.02.2.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	30	30	88.693.700	88.693.700	
601.02.2.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	40	40	55.426.800	55.426.800	
601.02.2.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30	30	209.442.600	209.442.600	
601.02.2.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	50	50	88.484.500	88.484.500	
601.02.2.01.000 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	3	1.522.699.300	1.511.262.000	Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
601.02.2.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	10.125.000	20.817.000	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	%	100	100	27.369.100	18.869.100	
601.02.2.02.000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	7.420.000	7.420.000	
601.02.2.02.000 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4	4	19.949.100	11.449.100	Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
601,03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	609.650.700	424.150.700	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	1	1			
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	30	30			
601.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	dokumen	4	4	34.322.700	17.985.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.03.2.01.000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	8.710.000	8.710.000	
601.03.2.01.000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	25.612.700	9.275.000	1. Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2. Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3. Pengurangan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4. Pengurangan Belanja Sewa Peralatan Umum
601.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	PD	4	4	575.328.000	406.165.700	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	%	100	100			
		Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100	100			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30	30	8.098.200	8.098.200	
601.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10	10	258.743.600	229.581.300	1. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2. Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3. Pengurangan Belanja Sewa Peralatan Umum
601.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	16	86.915.200	86.915.200	
601.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	6	6	221.571.000	281.571.000	Penambahan jasa konsultasi
Jumlah						9.950.362.156	9.950.348.956	

- 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Inspektorat				9.97 5.36 2.15 6,00	9.95 0.36 2.15 6,00	9.950. 348.65 6,00							10.4 74.3 97.4 64,0 0		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				9.97 5.36 2.15 6,00	9.95 0.36 2.15 6,00	9.950. 348.65 6,00							10.4 74.3 97.4 64,0 0		
	6	0 1				INSPEKTORAT DAERAH				9.97 5.36 2.15 6,00	9.95 0.36 2.15 6,00	9.950. 348.65 6,00							10.4 74.3 97.4 64,0 0		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)			
									Semula	Menja di	Renj a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	6	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85,50 Indeks	84.5 Indeks	84.5 Indeks	7.33 4.76 0.45 6,00	7.33 8.47 0.45 6,00	7.533. 202.55 6,00						85.0 Indeks	7.70 1.76 5.67 9,00		
	6	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	100 %	100%	53.4 14.1 00,0 0	53.4 14.1 00,0 0	53.414 .100,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100%	56.0 84.8 05,0 0	INSPEKTOR AT	
	6	0 1	0 1	2. 01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	9 Dokume n	9 Doku men	6.35 7.70 0,00	6.35 7.70 0,00	6.357. 700,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9 Doku men	6.67 5.58 5,00	INSPEKTOR AT	
	6	0 1	0 1	2. 01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	7 Laporan	7 Lapora n	47.0 56.4 00,0 0	47.0 56.4 00,0 0	47.056 .400,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7 Lapora n	49.4 09.2 20,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	5.97 1.28 6.70 6,00	5.97 1.28 6.70 6,00	5.971. 286.70 6,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	6.26 9.85 1.04 1,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bu lan	37 Orang/b ulan	34 Orang /bula n	5.96 5.45 6.70 6,00	5.96 5.45 6.70 6,00	5.733. 671.50 6,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		37 Orang /bula n	6.26 3.72 9.54 1,00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja 2024	APB 2024	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	250 Dokumen	1.59 0.00 0,00	1.59 0.00 0,00	1.590. 000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		250 Dokumen	1.66 9.50 0,00	INSPEKTOR AT	
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	4.24 0.00 0,00	4.24 0.00 0,00	4.240. 000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		18 Laporan	4.45 2.00 0,00	INSPEKTOR AT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	422. 486. 000, 00	422. 486. 000, 00	422.48 6.000, 00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	443. 610. 300, 00	INSPEKTOR AT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renj a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	49.7 39.8 00,0 0	49.7 39.8 00,0 0	49.739 .800,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2 Paket	52.2 26.7 90,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 05	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	47 Orang	46 Orang	34 Orang	148. 309. 200, 00	148. 309. 200, 00	148.30 9.200, 00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		47 Orang	155. 724. 660, 00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	37 Orang	37 Orang	34 Orang	224. 437. 000, 00	224. 437. 000, 00	392.81 8.000, 00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		37 Orang	235. 658. 850, 00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100 %	297. 839. 500, 00	297. 839. 500, 00	297.83 9.500, 00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	312. 998. 675, 00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renj a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	4.48 9.00 0,00	4.48 9.00 0,00	4.489. 000,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	4.71 3.45 0,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	27.6 79.1 00,0 0	27.6 79.1 00,0 0	27.679 .100,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Paket	29.0 63.0 55,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	20.1 26.5 00,0 0	20.1 26.5 00,0 0	20.126 .500,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Paket	21.1 32.8 25,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2. 06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	19.8 42.8 00,0 0	19.8 42.8 00,0 0	19.842 .800,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12 Paket	20.8 34.9 40,0 0	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)					
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	6	0 1	0 1	2. 06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																1 Paket	17.0 00.0 00,0 0	INSPEKTOR AT
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	15.9 36.0 00,0 0	15.9 36.0 00,0 0	15.936 .000,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							
	6	0 1	0 1	2. 06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																24 Doku men	2.83 5.00 0,00	INSPEKTOR AT
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	12 Dokume n	12 Doku men	2.70 0.00 0,00	2.70 0.00 0,00	2.700. 000,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							
	6	0 1	0 1	2. 06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																20 Lapora n	217. 419. 405, 00	INSPEKTOR AT
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	20 Laporan	32 Lapora n	207. 066. 100, 00	207. 066. 100, 00	334.75 2.300, 00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100 %	100 %	13.9 77.9 00,0 0	13.9 77.9 00,0 0	13.977 .900,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	14.6 76.7 95,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	5 Unit	13 Unit	13.9 77.9 00,0 0	13.9 77.9 00,0 0	73.440 .000,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		21 Unit	14.6 76.7 95,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100 %	100 %	412. 774. 950, 00	412. 774. 950, 00	412.77 4.950, 00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	433. 413. 698, 00	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	24 Lapora n	103. 689. 600, 00	103. 689. 600, 00	103.68 9.600, 00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		36 Lapora n	108. 874. 080, 00	INSPEKTOR AT

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renj a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92,5%	89%	89%									90%		
							Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100%	90%	90%											100%
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	10 PD	10 PD	1.978.581.900,00	1.974.871.900,00	1.974.871.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 PD	2.077.510.995,00	INSPEKTORAT
							Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70%	70%	70%											70%
							Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,5%	87,5%	87,5%									87,5%		
							Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%											90%
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan	30 Laporan	30 Lapora n	88.6 93.7 00,0 0	88.6 93.7 00,0 0	88.693 .400,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 Lapora n	93.1 28.3 85,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 01	000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan	40 Laporan	40 Lapora n	55.4 26.8 00,0 0	55.4 26.8 00,0 0	55.426 .800,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		40 Lapora n	58.1 98.1 40,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 01	000 3	Reviu Laporan Kinerja															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	30 Laporan	30 Lapora n	209. 442. 600, 00	209. 442. 600, 00	209.44 2.600, 00	Kota Blitar, Sananw etan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 Lapora n	219. 914. 730, 00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 01	000 4	Reviu Laporan Keuangan															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200 Laporan	50 Laporan	50 Lapora n	88.4 84.5 00,0 0	88.4 84.5 00,0 0	88.484 .500,0 0	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		50 Lapora n	92.9 08.7 25,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 01	000 6	Kerja Sama Pengawasan Internal															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakat an	3 Kesepak atan	3 Kesep akatan	1.52 6.40 9.30 0,00	1.52 2.69 9.30 0,00	1.511. 262.00 0,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Kesep akatan	1.60 2.72 9.76 5,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 01	000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokumen	4 Dokume n	4 Doku men	10.1 25.0 00,0 0	10.1 25.0 00,0 0	20.817 .000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	-		4 Doku men	10.6 31.2 50,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	100 %	100 %	27.3 69.1 00,0 0	27.3 69.1 00,0 0	27.369 .100,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkunga n Pemerintah Daerah	100 %	28.7 37.5 55,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 2	2. 02	000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 Dokumen	4 dokume n	4 doku men	59.3 22.7 00,0 0	34.3 22.7 00,0 0	34.322 .700,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkunga n Pemerintah Daerah	4 doku men	62.2 88.8 35,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekomend asi	4 Rekome ndasi	4 Rekom endasi	8.71 0.00 0,00	8.71 0.00 0,00	8.710. 000,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 Rekom endasi	9.14 5.50 0,00	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16 Rekomend asi	4 Rekome ndasi	4 Rekom endasi	50.6 12.7 00,0 0	25.6 12.7 00,0 0	9.275. 000,00	Kota Blitar, Sananw etan, Sananw etan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 Rekom endasi	53.1 43.3 35,0 0	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16 PD	4 PD	4 PD	575. 328. 000, 00	575. 328. 000, 00	575.32 8.000, 00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkunga n Pemerintah Daerah	4 PD	604. 094. 400, 00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indi katif (Rp)		
									Semula	Menja di	Renja a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%									100%		
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	100%	100%									100%		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	8.09 8.20 0,00	8.09 8.20 0,00	8.098. 200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 perangkat daerah	8.50 3.11 0,00	INSPEKTOR AT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	258. 743. 600, 00	258. 743. 600, 00	229.58 1.300, 00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10 perangkat daerah	271. 680. 780, 00	INSPEKTOR AT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
									Semula	Menja di	Renj a 202 4	APB D 202 4	Renja 2024 Perub ahan				Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	86.915.200,00	86.915.200,00	86.915.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		16 Kegiatan	91.260.960,00	INSPEKTOR AT	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	221.571.000,00	221.571.000,00	81.571.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6 perangkat daerah	232.649.550,00	INSPEKTOR AT	
	J U M L A H										9.975.362.156,00	9.950.362.156,00	9.950.348.656,00								10.474.397.464,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

4.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Inspektur Pembantu dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pengawasan yang semakin kompleks, Inspektorat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan pengawasan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses pengawasan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana

- e. Dengan ditetapkannya P-Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan P-Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.